



MISTERI SOSOK X,Y DAN Z PENERIMA MILIARAN RUPIAH DUIT KORUPSI BTS

Kesaksian-kesaksian baru mencuat dalam pusaran korupsi BTS (Base Transceiver Station) 4G. Muncul sosok X,Y dan Z yang disinggung oleh seorang terdakwa yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. Sosok misterius ini diduga menerima aliran uang dari Irwan. Irwan diklaim hanyalah kurir pengantar uang haram proyek milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sosok X diduga menerima aliran Rp 52,5 miliar. Sementara yang diterima Y sebesar Rp 10 miliar dan Rp 27 miliar untuk Z. Bahkan, pengacara terdakwa Irwan, Maqdir Ismail, berjanji akan membawa uang sebesar Rp 27 miliar--dikembalikan penerima--dalam bentuk dolar pada Kamis (13/7/2023) saat dia dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung).Kejagung sendiri memastikan akan mengusut hingga akar-akarnya. Sampai saat ini sudah sekitar 500 saksi diperiksa untuk mengusut perkara dengan salah satu tersangka mantan Menkominfo Johnny G Plate tersebut.

(Baca Hal 11)



RINCIANNYA ALIRAN DANA KORUPSI BTS VERSI KOMISARIS PT SOLITECH MEDIA SINERGY IRWAN HERMAWAN

- | | | |
|--|--|--|
| <p>PENERIMAAN X</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menyerahkan kepada seorang bernama Setio Rp 6 miliar. Dia merupakan pengacara dari X. -Menyerahkan Rp 52,5 miliar kepada X. -Menyerahkan uang sekitar Rp 43,5 miliar kepada Galumbang untuk diserahkan kepada X sekitar Rp 1,5 miliar. | <p>PENERIMAAN Y</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uang yang diserahkan kepada Galumbang juga mengalir kepada Y sebesar Rp 10 miliar. | <p>PENERIMAAN Z</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uang yang diserahkan kepada Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT.Mora Telematika Indonesia, juga mengalir kepada Z sebesar Rp 27 miliar. |
|--|--|--|

UU Kesehatan Resmi Disahkan Nakes Ancam Mogok Nasional, DPR Sebut Kini 'Bola'di Pemerintah



Sejumlah pengunjung rasa dari tenaga medis dan kesehatan menggelar aksi di depan gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023) saat RUU Kesehatan resmi disahkan menjadi Undang-undang.

JAKARTA-Ratusan massa Tenaga Kesehatan (Nakes) dari berbagai organisasi profesi yang berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/7/2023) akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB. Diketahui, akhirnya Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) sah menjadi Undang-Undang (UU) Kesehatan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Sambil membubarkan diri, massa mengancam akan melakukan mogok kerja nasional apabila RUU Kesehatan tetap disahkan oleh DPR RI. "Kawan-kawan, perjuangan kita, aksi kita, tidak berhenti sampai di sini. Kita lakukan konsolidasi massa yang lebih besar untuk mogok nasional. Apa kawan-kawan?" teriak orator dari atas mobil komando. "Mogok nasional," sahut massa sambil berjalan meninggalkan gedung DPR RI.

Ratusan massa dari organisasi profesi kesehatan ini berasal dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi demonstrasi tersebut. Puan mengatakan sejak awal Komisi IX DPR RI bersama pemerintah sudah membuka seluas-luasnya aspirasi kepada masyarakat.

"Terkait dengan RUU kesehatan DPR melalui Komisi IX dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada semua pihak yang kemudian mempunyai kepentingan, aspirasi, dan masukan dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan secara simultan beberapa bulan yang lalu," kata Puan usai rapat paripurna,

kompleks parlemen, Selasa (11/7/2023).

Puan menyebut DPR sudah rampung menyelesaikan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Jika ada aspirasi yang belum ditampung, ia menyarankan disampaikan langsung kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Jadi kalau kemudian ada pihak pihak yang merasa bahwa masukan aspirasi, hak konstitusionalnya kemudian belum terakomodir mungkin bisa menyampikannya lagi kepada pemerintah karena DPR sudah selesai," ujar Puan. "Bisa memberikan masukan tersebut aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui kementerian kesehatan," sambungnya.

Ia mengatakan, jika aspirasi itu belum memberikan hasil yang diinginkan, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, cara ini bisa ditempuh secara konstitusional.

"Namun, kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK," kata Puan. "Jadi silakan saja ini negara hukum, semua proses mekanisme yang ada sudah kami lakukan, kalau kemudian merasa kurang puas masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional," imbuhnya.

Terpisah, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa wajar saja perbedaan pendapat. Walau begitu, sebaiknya dapat disampaikan dengan cara yang sehat. "Di alam demokrasi ini saya sangat menerima perbedaan pendapat," kata Budi Gunadi usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

"Saya tidak ingin mundur balik. Yang beda pendapat itu wajar, sampaikanlah dengan cara sehat dan intelektual. Saya enggak akan menutup pintu, WhatsApp juga akan saya balas."

Disampaikan kembali oleh Budi Gunadi, setiap orang belum tentu memiliki kesamaan argumen dalam perubahan Undang-Undang Kesehatan. "Saya welcome sekali (dengan perbedaan pendapat)," tutur Budi.

STR Seumur Hidup

Di sisi lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan UU Kesehatan ini menjadi langkah awal perbaikan sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Fasilitas kesehatan sempat 'kolaps' dan minimnya pasokan alat kesehatan menjadi gambaran kesiapan negara menghadapi pandemi COVID-19. Mencegah kesulitan serupa, revisi Undang Undang ini bisa menjadi perbaikan saat menghadapi pandemi selanjutnya.

"Pandemi COVID-19 membuka mata kita akan banyaknya perbaikan yang harus dikerjakan," beber Menkes dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (11/7/2023).

Menkes menyebut RUU Kesehatan membantu standardisasi layanan primer. Masyarakat lebih mudah mendapatkan pengobatan, pembiayaan yang semula tidak efisien menjadi lebih transparan. "Dari nakes yang kurang menjadi cukup dan merata, pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan produksi pemerataan dokter dan dokter spesialis,

"Dari perizinan yang rumit menjadi mudah. Memang diperlukan lonteks penyederhanaan dan perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup," kata dia.

Nakes disebutkan bakal lebih dilindungi melalui UU Kesehatan baru, secara khusus bagi nakes jika ada tindakan pidana akan melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu. "Dari nakes yang rentan didiskriminasi menjadi dilindungi, nakes memerlukan perlindungan hukum baik dari tindak kekerasan pelecehan maupun perundangan dari sesama," pungkasnya.

Pada aksi kali ini, Ketua PPNI Harif Fadhilah menyampaikan bahwa PPNI sudah melakukan rapat kerja nasional pada 9 hingga 11 Juli lalu dan sepakat untuk menjadikan mogok nasional sebagai opsi jika RUU Kesehatan tetap disahkan.

"Tapi memang mogok nasional itu dilakukan secara kolektif dengan empat organisasi profesi yang lainnya

oleh karena itu sampai hari ini kita terus mengkonsolidasikan itu supaya ini bisa terlaksana. Jadi sangat tergantung pada empat OP lain," ujar Harif dalam aksi demo di depan Gedung DPR RI, Selasa (11/7/2023).

Harif pun menjelaskan bagaimana mogok kerja itu akan berjalan. Namun, pelayanan kesehatan kritis seperti di ICU tetap berjalan demi keselamatan pasien. "Kami sudah sepakati kalau mogok itu kecuali tempat-tempat yang kritikal, ICU, gawat darurat, kamar bedah, untuk anak-anak yang emergensi itu tidak kita lakukan (mogok)." Layanan yang mogok adalah layanan umum, elektif (bersifat pilihan), dan layanan yang bisa direncanakan. (wid,rls,ant,kum/dya)

POIN-POIN YANG MENJADI ALASAN PENOLAKAN UU KESEHATAN

1. Penghilangan mandatory spending
UU Kesehatan menghilangkan pasal aturan terkait mandatory spending alias wajib belanja. Dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur besarnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji.

2. Liberalisasi melalui tenaga kesehatan WNA
UU Kesehatan membuka keran tenaga kesehatan WNA untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan Indonesia. Selain itu, UU Kesehatan juga menghapus aturan sebelumnya yang mewajibkan WNA tenaga kesehatan harus bisa berbahasa Indonesia.

3. STR berlaku seumur hidup
Lewat Omnibus Law UU Kesehatan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis yang saat ini perlu perpanjangan per lima tahun akan diubah menjadi berlaku seumur hidup layaknya ijazah. STR akan tetap dikeluarkan oleh Konsil. Namun, Konsil tersebut akan menjadi satu kesatuan integrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ataupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

4. Penghapusan rekomendasi OP dalam penerbitan SIP
UU Kesehatan menghapus rekomendasi Organisasi Profesi (OP) dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP). Sementara berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran misalnya, dalam pasal disebutkan syarat menerbitkan SIP ada tiga kondisi. Berdasarkan pasal 38, tiga syarat yakni wajib memiliki STR aktif, tempat praktik, dan rekomendasi OP. Namun dalam UU Kesehatan, syarat menerbitkan SIP hanya dua, yakni memiliki STR dan tempat praktik.

5. Rawan penyalahgunaan data genomik WNI
OP juga menyoroti kekhawatiran terkait aturan transfer data. Sebab, berdasarkan pasal 338 draf final RUU Kesehatan, terdapat aturan terkait teknologi biomedis. Pemanfaatan teknologi biomedis itu termasuk mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik terkait organisme, jaringan, sel, biomolekul, dan teknologi biomedis lain.



Ironi! 12 Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Malah Tak Patuh LHKPN

JAKARTA- Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dibentuk dengan tugas mulia. Mulai dari mengawal kinerja anggota dan pimpinan DPR, khususnya terkait perilaku dan kode etik. Hingga bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Sayangnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dari 17 anggota MKD, 12 orang di antaranya diketahui tidak patuh melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK dalam rentang waktu 2019-2022. Mereka di antaranya ada yang tidak melapor atau telat melapor.

"Ini artinya, sebagian besar atau lebih dari 70 persen mereka terbukti mengabaikan kewajiban hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023). Untuk itu ICW mendesak agar komposisi MKD dirombak ulang.

Pada pertengahan April 2023, pihaknya sempat melaporkan 55 orang pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI ke MKD. Namun setelah dua bulan, tak ada tindak lanjutnya.

ICW mengartikan bahwa MKD melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan etik anggota DPR. Tak lama setelahnya, ICW malah menemukan fakta baru bahwa MKD itu sendiri tidak patuh LHKPN.

Kurnia mengatakan, temuan itu bertolakbelakang dengan tujuan pembentukan MKD yang tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga legislatif.

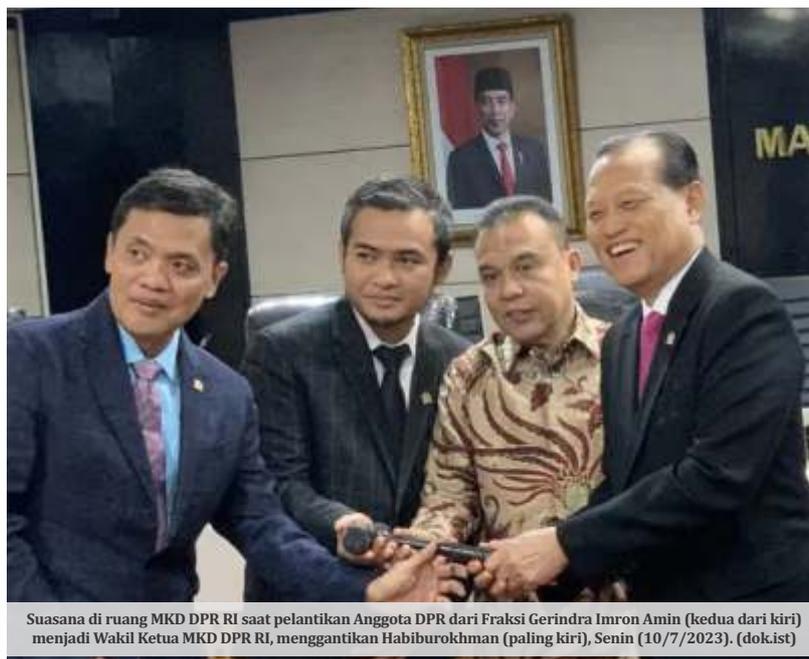
"Sederhananya, bagaimana mungkin MKD akan mampu menjalankan mandat itu jika anggotanya saja bermasalah dalam hal kepatuhan hukum," kata dia.

Konteks pelanggaran hukum yang dimaksud, lanjut Kurnia, tertera dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Juga Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Dua aturan itu memandatkan kepada setiap penyelenggara negara, termasuk anggota DPR, untuk secara berkala melaporkan harta kekayaannya selama menjabat kepada KPK dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun selanjutnya," kata dia.

"Pada faktanya, peraturan yang dibuat, salah satunya oleh lembaga legislatif, justru diingkari oleh mereka sendiri," sambungnya.

Sedangkan indikasi pelanggaran



Suasana di ruang MKD DPR RI saat pelantikan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Imron Amin (kedua dari kiri) menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI, menggantikan Habiburokhan (paling kiri), Senin (10/7/2023). (dok.ist)

kode etik tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. "Di sana disebut bahwa anggota DPR wajib mematuhi hukum dan bersedia untuk diawasi oleh masyarakat. Kepatuhan hukum dalam hal ini merujuk pada UU 28/99 dan ketidakpatuhan pelaporan LHKPN dapat pula dipandang sebagai upaya menolak pengawasan masyarakat terhadap harta kekayaannya," kata dia.

"Kombinasi pelanggaran hukum dan etik seperti ini mestinya segera ditindaklanjuti, bukan justru didiamkan begitu saja, apalagi terjadi di nomenklatur DPR yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika," sambung dia.

Adapun ketidakpatuhan pelaporan LHKPN yang ICW maksud terdiri dari empat jenis. Pertama, terlambat dalam melaporkan. "Bagian ini berpijak pada Pasal 4 ayat (4) PerKPK 2/20 yang menyebutkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN jatuh pada tanggal 31 Maret tahun selanjutnya," kata Kurnia.

Kedua, tidak secara berkala melaporkan. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PerKPK 2/20 terkait keberkalan LHKPN setiap tahun selama menjabat sebagai penyelenggara negara. Ketiga, kombinasi antara terlambat dan tidak melaporkan secara berkala. Keempat, tidak melaporkan sama sekali sejak tahun 2019 sampai 2022.

Kurnia mengatakan, ICW akan segera melaporkan 12 orang anggota MKD tersebut ke instansinya sendiri atas dugaan pelanggaran etik karena tidak patuh LHKPN.

Atas dasar itu, ICW juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan menindaklanjuti laporan ICW terhadap 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dengan

memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi. Selain itu juga, Partai Politik segera mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan yang diketahui tidak patuh melaporkan LHKPN.

Banyak Pejabat Belum Laporkan

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak pejabat negara dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang janggal. Isu tersebut menjadi atensi KPK.

"Kami juga meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya ya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang LHKPN-nya tidak mencerminkan yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta.

Untuk itu, disampaikan Alex bahwa jajaran pimpinan KPK telah meminta agar dilakukan pemetaan terhadap LHKPN para pejabat negara. Harta para pejabat di sejumlah instansi strategis menjadi prioritas KPK untuk dipetakan. "Antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum, entah itu jaksa, polisi, dan hakim. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka," ungkap Alex.

Alex menerangkan, LHKPN merupakan dokumen yang dapat diakses secara terbuka oleh publik luas. Dengan mengakses LHKPN, publik dapat turut andil dalam menelusuri dugaan harta pejabat negara yang janggal. Dia menekankan, penyampaian LHKPN mesti dipandang sebagai sebuah kewajiban sekaligus bentuk transparansi pejabat negara ke publik luas. (wid,rls,kum,ist/dya)

KEPATUHAN LHKPN MKD BERDASARKAN PEMANTAUAN ICW

1. **ADANG DARADJATUN**
KetuaPKS
Patuh

2. **TRIMEDYA PANJAITAN**
Wakil KetuaPDIP
Patuh

3. **ANDI RIO IDRIS P**
Wakil KetuaGolkar
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022)

4. **HABIBUROKHAMAN**
Wakil KetuaGerindra
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2021)

5. **NAZARUDDIN DEK GAM**
Anggota PAN
Tidak Patuh (Terlambat melaporkan tahun 2020, 2021, dan 2022)

6. **HASANUDDIN**
AnggotaPDIP
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2020 dan 2021. Terlambat melaporkan tahun 2022)

7. **YULIAN GUNHAR**
Anggota PDIP
Patuh

8. **JUNIMART GIRSANG**
Anggota PDIP
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2021. Terlambat melaporkan tahun 2020)

9. **ALIEN MUS**
AnggotaGolkar
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2020. Terlambat melaporkan tahun 2021)

10. **R IMRON AMIN**
Anggota Gerindra
Patuh

11. **FADHOLI**
Anggota Nasdem
Tidak Patuh (Terlambat melaporkan tahun 2021 dan 2022)

12. **NYAT KADIR**
Anggota Nasdem
Patuh

13. **MAMAN IMANUL HAQ**
Anggota PKB
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2020 dan 2021)

14. **M RANO ALFATH**
Anggota PKB
Tidak Patuh (Terlambat melaporkan tahun 2021)

15. **SARTONO**
Anggota Demokrat
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2019)

16. **BAMBANG PURWANTO**
AnggotaDemokrat
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2020 dan 2022)

17. **ASEP AHMAD M A**
Anggota PPP
Tidak Patuh (Tidak melaporkan tahun 2020. Terlambat melaporkan tahun 2021)

Pemkab Pacitan Tunggu Hasil Laboratorium Enam Orang Suspek Antraks



Petugas menyuntikkan vaksin ke hewan ternak. Foto: Diskominfo Kota Surabaya

PACITAN – Pemkab Pacitan dalam hal ini Dinas Kesehatan masih menunggu hasil laboratorium Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates, Yogyakarta terkait enam orang suspek penyakit antraks yang ditemukan beberapa waktu lalu.

"Jadi saat ini kami sedang menunggu hasilnya. Kalau kondisi enam orang itu sekarang sudah sembuh semua," ujar Daru Mustikoaji Plt Kadinkes Pacitan dilansir dari suarasurabaya.net, Selasa (11/7/2023).

Kecurigaan bahwa enam orang tersebut terserang penyakit antraks bermula dari salah satu warga yang periksa ke Puskesmas karena mengeluh terkena penyakit kulit selama dua pekan. Keluhan satu pasien tersebut dinilai petugas kesehatan mengarah ke penyakit antraks. Akhirnya tim kesehatan setempat melakukan penelitian epidemiologi untuk menelusurinya. Hasilnya, ditemukan lima orang lainnya dengan luka sejenis.

Gejala yang dianggap mengarah pada penyakit antraks lebih menguat lagi, sebab seelain mengalami luka kulit, sebagian pasien suspek itu juga mengalami gejala demam. Setelah menjalani perawatan beberapa hari di Puskesmas, keenam orang ini dinyatakan sembuh. Meski demikian, Daru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk menentukan langkah selanjutnya.

Dugaan adanya antraks yang menyerang enam warga tersebut berasal dari kambing Peranakan Ettawa (PE) yang mati sebelumnya. Namun Daru mengaku belum mendeteksi penyakit antraks pada hewan tersebut. "Tidak terdeteksi karena kejadiannya sudah sekitar dua minggu (sebelum suspek)," katanya.

Dari temuannya, enam warga itu

sehari-hari berkegiatan di peternakan. Dari situlah mereka punya riwayat kontak dengan hewan ternak yang mati akibat penyakit. "Ada kematian hewan sebelumnya, rata-rata ada riwayat pegang dan berdekatan," jelasnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur (Jatim) telah mengeluarkan surat edaran tentang Kewaspadaan Penyakit Antraks yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota pada 5 Juli lalu.

Dokter Erwin Astha Triyono Kadinkes Jatim mengatakan, penyakit antraks termasuk penyakit zoonosa yang disebabkan oleh *Bacillus anthracis* yang bersifat akut dan dapat menimbulkan kematian. Selain itu pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk kewaspadaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Antraks.

Serta meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dengan melaksanakan surveilans aktif kasus antraks dengan menambahkan keterkaitan dengan faktor risiko adanya kontak hewan ternak (sapi/kambing/kerbau) mati dan lingkungan yang terkontaminasi spora antraks. "Kami juga melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan antraks di wilayahnya," ujar Erwin, Senin (10/7/2023).

Terkait dengan penyakit antraks ini, Pemkot Surabaya juga melakukan upaya antisipasi dengan meminta semua kecamatan waspada dan melaporkan jika menemui gejala hewan sakit. Meski demikian sampai saat ini Surabaya dinyatakan bebas antraks.

Dokter Hewan Sunarno Aristono, Kepala Bidang Peternakan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Surabaya, menyebut sejak ditetapkan sebagai daerah bebas antraks, tidak pernah ada laporan kasus di Kota Pahlawan. "Sebenarnya Surabaya itu bebas rabies sejak 1997 dan bebas antraks. Karena tidak pernah ada kasus. Mudah-mudahan tetap bebas selamanya," ujar Aris, pada Selasa (11/7/2023).

Meski tidak ada kasus, lanjut Aris, Dinas KPP meminta semua kecamatan di Surabaya agar waspada. Kewaspadaan itu akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) Antraks dan Rabies meneruskan edaran turunan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. "Ini akan kita buat surat edaran wali kota ke camat-camat. Secepatnya. (Masih) diperiksa dahulu di bagian hukum untuk dikoreksi," terangnya.

Para camat diminta melakukan sejumlah langkah kewaspadaan antraks dan rabies mulai identifikasi pola lalu lintas hewan dari daerah menular hingga vaksinasi. "Bisa melaporkan kalau di wilayahnya ada sapi yang sakit seperti gejala antraks atau hewan yang rabies," tambahnya.

Sementara itu, soal langkah pemerintah pusat, Kementerian Pertanian RI membentuk kader zoonosis di setiap daerah, lanjut Aris, Pemkot masih menunggu petunjuk teknis. "Belum ada. Yang ada kader flu burung ditingkat kelurahan dua orang. Mungkin bisa berubah namanya kader flu burung jadi kader zoonosis nantinya. Nunggu juknis dari pusat," tandasnya.

Sementara itu, Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan di Pulau Madura melakukan karantina pada 870 ekor

sapi yang hendak dikirim ke Pontianak sebagai upaya deteksi dini kemungkinan adanya sapi yang terserang penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, serta lumpy skin disease (LSD).

Kepala Karantina Pertanian Bangkalan, Agus Mugiyanto, mengatakan tindakan itu dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sapi yang terserang penyakit, mengingat jenis penyakit tersebut masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Jadi sebelum dilalulintaskan, sapi sebanyak 870 ekor dengan tujuan Pontianak ini kami karantina dulu dengan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk kelengkapan dokumen, serta pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan di laboratorium," kata Agus.

Ia menuturkan, sapi-sapi asal Madura yang hendak dikirim ke Pontianak sebanyak 870 itu senilai Rp15,6 miliar lebih. "Pemilik semuanya telah memenuhi persyaratan berupa rekomendasi pengeluaran dari daerah asal ternak, rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan, telah divaksin PMK, telah divaksin LSD (sudah 28 hari), hasil laboratorium negatif dari uji brucellosis, serta sertifikat Kesehatan hewan dari Dinas Peternakan daerah asal," katanya dikutip dari jatimantaranews.com, Selasa (11/7/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) juga memperkuat langkah antisipatif terhadap penyakit antraks. Hal ini diungkapkan Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, karena terdapat kasus antraks yang cukup tinggi di Gunungkidul, DIY.

Menurut Slamet, kasus antraks di Kota Malang pada umumnya masih terbilang aman. "Alhamdulillah tidak ada kasus antraks. Semoga tidak sampai masuk (ke Kota Malang)," kata Slamet dikutip dari Republika, Kamis (6/7/2023).

Agar kasus antraks tidak terjadi di Kota Malang, Dispangtan akan berkoordinasi aktif dengan Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Kemudian memberikan pembekalan kepada para penyuluh untuk memantau perkembangan kasus antraks. Hal ini terutama di wilayah kerjanya masing-masing yang tersebar di lima kecamatan.

Selain itu, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dispangtan juga akan melakukan monitoring ke titik lokasi peternakan secara langsung. "Dan juga melalui kelompok maupun RT atau RW setempat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Slamet juga memberikan imbauan khusus kepada peternak yang memiliki hewan ternak. Jika peternak menemukan tanda-tanda antraks, mereka diimbau untuk segera melapor ke penyuluh atau RT dan RW. Mereka juga dapat langsung memberikan laporan ke Dispangtan Kota Malang. (lut/dya)



IKAN LEMURU DAN TONGKOL DOMINASI PRODUKSI TANGKAPAN PELABUHAN PERIKANAN GRAJAGAN

BANYUWANGI-Menutup bulan Juni 2023, produksi Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Grajagan didominasi oleh ikan lemuru dan ikan tongkol. IPPP Grajagan merupakan pelabuhan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di

bawah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Muncar yang terletak di Kabupaten Banyuwangi.

Selain menjadi pelabuhan yang strategis di wilayah selatan, IPPP Grajagan juga sudah dilengkapi gerai pelayanan terpadu sejak 2021 lalu.

Sebanyak 11 layanan hadir di gerai tersebut. Di antaranya adalah izin jasa pelabuhan, rekomendasi BBM, Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Surat Persetujuan Berlayar (STB), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), PAS Kapal, Kartu

Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), hingga BPJS Ketenagakerjaan. Dengan gerai dan lokasi serta daya tampung kapal yang banyak di pelabuhan Grajagan, membuat pelabuhan ini prospek kedepannya untuk bisnis kelautan dan perikanan.

Total komoditas tangkapan ekonomis penting yang didaratkan pada bulan Juni 2023 sejumlah 94.527 Kg dengan total nilai produksi sebesar Rp 1.155.275.000. Di urutan pertama adalah ikan lemuru dengan total volume produksi sebesar 56.290 Kg, kedua ikan tongkol dengan total volume produksi sebesar 33.282 Kg, selanjutnya ada cumi dengan total volume produksi sebesar 1.933 Kg, ikan cakalang dengan total volume produksi 1.920 Kg, ikan kembung dengan total volume produksi 634 Kg, ikan kakap dengan total volume produksi 341 Kg dan ikan kerapu sejumlah 127 Kg. (ADV)

TOTAL KOMODITAS TANGKAPAN EKONOMIS PENTING YANG DIDARATKAN PADA BULAN JUNI 2023

Total 94.527 Kg dengan nilai produksi sebesar Rp 1.155.275.000. Rinciannya :

- Ikan lemuru dengan total volume produksi sebesar 56.290 Kg
- Ikan tongkol dengan total volume produksi sebesar 33.282 Kg
- Cumi dengan total volume produksi sebesar 1.933 Kg
- Ikan cakalang dengan total volume produksi sebesar 1.920 Kg
- Ikan kembung dengan total volume produksi sebesar 634 Kg
- Ikan kakap dengan total volume produksi sebesar 341 Kg
- Ikan kerapu dengan total volume produksi sebesar 127 Kg.



Sidang Kasus Dana Hibah : Jaksa Curigai Aliran Pokir Usulan Fawait

SURABAYA – Sidang dugaan suap dana hibah Pokir bersama terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya terus berkembang. Bahkan, pada sidang yang digelar Selasa (11/7/2023) kemarin, menguak adanya aliran dana pokir senilai Rp 1,9 miliar yang men-curigakan diduga dari usulan Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim.

Dikutip dari beritajatim.com, dalam sidang tersebut, Fawait diperiksa sebagai saksi pertama, sebelum akhirnya majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Dewa Suardita juga memeriksa saksi Wara Sundari Reni Pramana dari Fraksi PDIP. Majelis hakim mengungkapkan rincian dana hibah Pokir yang diduga usulan Fawait ini antara lain Rp750 juta di Sampang,

Rp600 juta di Pamekasan, Rp350 juta di Jombang, dan Rp 200 juta di Surabaya. Hal itu berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa KPK dalam persidangan di ruang Candra PN Tipikor Surabaya tersebut.

Namun, Fawait yang diperiksa sebagai saksi membantah. Dia mengaku hanya mengusulkan pokir untuk wilayah dapilnya saja, yaitu Jember dan Lumajang. Fawait juga membantah telah menerima dana dari alokasi dana tersebut.

Jaksa KPK Ihsan SH MH kemudian menanyakan tentang ijon fee, apakah itu merupakan hak anggota dewan? Saksi menjawab bahwa itu tidak benar. Saksi juga menyatakan bahwa sebagai pihak yang mengusulkan, dia juga tidak diizinkan menerima ijon fee.

Saksi juga ditanya apakah dana

hibah Pokir boleh diberikan di luar dapil. Saksi menjawab bahwa itu tidak boleh. Jaksa KPK Ihsan kemudian menunjukkan bukti berupa aliran dana Pokir kepada beberapa anggota dewan, salah satunya adalah saksi Muhammad Fawait. Dalam bukti tersebut tercantum bahwa nama Muhammad Fawait tercatat sebagai pengusul dana hibah Pokir untuk empat wilayah, yaitu Rp 750 juta di Sampang, Rp 600 juta di Pamekasan, Rp 350 juta di Jombang, dan Rp 200 juta di Surabaya.

Terkait dengan apa yang disampaikan jaksa tersebut, Fawait langsung membantahnya. "Itu bukan usulan saya, saya tidak pernah mengusulkan di luar wilayah dapil saya," ujarnya.

Usai sidang, Jaksa KPK Ihsan

mengatakan bahwa bukti pengusulan dana hibah Pokir kepada sejumlah anggota dewan, termasuk saksi Muhammad Fawait, merupakan data yang dikeluarkan oleh Bapedda. Terkait dengan dana hibah Pokir yang tidak diakui oleh saksi untuk empat kota tersebut, Ihsan mengatakan pihaknya akan menyelidikinya lebih lanjut. "Karena saksi Bapedda sudah memberikan keterangannya, kita tidak bisa lagi mengonfirmasi hal tersebut. Yang jelas, akan kita kembangkan," ujarnya.

Sementara, dalam pemeriksaan saksi kedua, Wara Sundari Reni Pramana mengaku tidak pernah berada di kantor, sehingga tidak memahami secara detail proses pengajuan dana hibah Pokir. "Saya tidak pernah tahu, karena semuanya ditangani oleh staf saya," ungkapnya. (lut/dya)



ZION SUZUKI

**Kiper Muda Timnas Jepang
Incaran Baru Manchester United**

Foto-foto : Berbagai Sumber

MANCHESTER United atau MU akhir-akhir ini dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Zion Suzuki, kiper muda dari Jepang untuk menggantikan Jack Butland sebagai pelapis kiper utama.

Dilansir dari goal.com, selain akan mendatangkan Andre Onana untuk menggantikan David De Gea yang belum jelas masa depannya di MU, Zion Suzuki yang masih berusia 20 tahun membuat aris-tek setan merah Erik Ten Hag kepincut untuk mendatangkan pemuda itu.

Lahir pada 21 Agustus 2002 di Amerika, kiper yang memiliki tinggi badan 1,90 cm ini merupakan pelapis penjaga gawang di Urawa Red Diamonds sejak 2019.

Zion Suzuki melakukan debut melawan Vegalta Sendai pada Mei 2021 sebagaimana dikutip dari situs Manchestereveningnews.

Dikutip dari transfermarkt, dari 28 pertandingan yang ia lakoni, Suzuki hanya kebobolan 11 kali.

Dari gaya permainannya sebagai kiper, dirinya lebih suka menangkap dibanding meninju bola dengan tingkat keberhasilan 57,1 persen dibandingkan dengan

tingkat keberhasilan pukulan, yakni 14,3 persen.

Di tim muda nasional Jepang, dirinya pernah tampil di gelaran Piala Dunia U-20 pada 2019. Saat ini, ia menjadi anggota tim nasional Jepang U-21.

Selain itu, Zion Suzuki juga merupakan kiper yang bergaya modern. Tidak seperti David De Gea yang masuk ke dalam kategori kiper tradisional, Suzuki dapat melakukan distribusi bola dari belakang atau dikenal sebagai sweeper keeper.

Profil, Zion Suzuki

Suzuki lahir di Little Rock, Arkansas di Amerika Serikat, 21 Agustus 2002.

Salah satu fakta menarik dari Zion Suzuki ialah karena dia lahir dari pasangan ayah

berkebangsaan Jepang dan Ibu yang berpaspor Ghana. Namun, dia tak lahir di Negeri Samurainya, melainkan di Amerika Serikat.

Pada usia 16 tahun 5 bulan, Suzuki menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Urawa Reds.

Ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Urawa Reds yang menandatangani kontrak profesional dengan klub tersebut.

Ia melakukan debut di Liga Jepang dalam pertandingan melawan Vegalta Sendai pada Mei 2021.

Sejak melakoni debutnya, Suzuki sukses mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan berturut-turut.

Suzuki telah tampil dalam 28 kesempatan

untuk Urawa Red Diamonds di semua kompetisi.

Namun sebagian besar penampilannya terjadi di Piala Liga Jepang.

Di level tim nasional, Suzuki telah satu kali di Timnas Jepang saat memulai debutnya pada Juli 2022 lalu.

Suzuki juga pernah menjadi kiper Jepang di Olimpiade 2020 lalu meski hanya berstatus sebagai pelapis.

Sebelum itu, ia juga telah mewakili tim nasional Jepang di setiap kelompok umur mulai dari U-15 hingga U-23.

Meski baru berusia 20 tahun, Suzuki sudah dinilai tinggi di Jepang dan dianggap sebagai aset masa depan Samurainya.

Postur tubuh mencapai 1,9 meter menjadi salah satu kelebihan kiper yang dibesarkan di Prefektur Saitama itu (berbagai sumber)



LECANEMAB, TEROBOSAN UNTUK MEMPERLAMBAT ALZHEIMER

FOOD and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa obat untuk memperlambat penyakit pikun alias demensia Alzheimer telah ditemukan.

"Kabar baik nih! Akhirnya ada obat pertama yang udah disetujui digunakan untuk memperlambat Alzheimer. Persetujuan dilakukan oleh FDA [BPOM-nya Amerika Serikat]. Namanya Lecanemab [Leqembi]," cuit dokter Adam Prabata melalui akun Twitter, Sabtu (8/7/2023).

Dilansir dari laman resmi FDA, pada Kamis (6/7/2023), FDA mengubah Leqembi (lecanemab-irmb), terbukti memiliki manfaat klinis untuk mengobati pasien dewasa dengan penyakit Alzheimer.

Leqembi adalah antibodi yang diarahkan beta amiloid pertama yang diubah dari persetujuan yang dipercepat menjadi persetujuan tradisional untuk pengobatan penyakit Alzheimer.

Obat ini bekerja dengan mengurangi plak amiloid yang terbentuk di otak, ciri patofisiologi penyakit yang menentukan.

Leqembi disetujui pada bulan Januari di bawah jalur percepatan persetujuan. Jalur ini memungkinkan FDA untuk menyetujui obat untuk kondisi serius untuk kebutuhan medis yang tidak terpenuhi, berdasarkan data klinis yang menunjukkan efek obat pada titik akhir pengganti—dalam kasus Leqembi, mengurangi plak amiloid di otak—yang kemungkinan besar akan terjadi.

Sebagai persyaratan pasca-pemasaran untuk persetujuan yang dipercepat, FDA mewajibkan pemohon untuk melakukan uji klinis, yang sering disebut sebagai studi konfirmasi, untuk memverifikasi manfaat klinis yang diantisipasi dari Leqembi. Khasiat Leqembi dievaluasi menggunakan hasil Studi 301 (CLARITY AD), uji klinis acak terkontrol Fase 3.

"Tindakan hari ini adalah verifikasi pertama bahwa obat yang menargetkan proses penyakit yang mendasari penyakit Alzheimer telah menunjukkan manfaat klinis dalam penyakit yang menghancurkan ini. Studi konfirmasi ini memverifikasi bahwa itu adalah pengobatan yang aman dan efektif untuk pasien dengan penyakit Alzheimer," kata Teresa Buracchio, pejabat direktur Kantor Ilmu Saraf di Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat FDA.

Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak progresif yang tidak dapat diubah yang memengaruhi lebih dari 6,5 juta orang Amerika.

Penyakit ini perlahan-lahan menghancurkan daya ingat dan keterampilan berpikir, dan akhirnya, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sederhana. Sementara itu, penyebab spesifik Alzheimer tidak sepenuhnya diketahui.

Salah satu tanda penyakit ini adalah perubahan di otak, termasuk pembentukan plak beta amiloid dan neurofibrillary.

Efek samping Leqembi yang paling umum adalah sakit kepala, reaksi terkait infus, dan kelainan pencitraan

terkait amiloid (ARIA), efek samping yang diketahui terjadi dengan kelas antibodi yang menargetkan amiloid.

ARIA paling sering muncul sebagai pembengkakan sementara di area otak yang terlihat pada studi pencitraan yang biasanya sembuh dari waktu ke waktu dan dapat disertai dengan bercak kecil pendarahan di dalam atau di permukaan otak.

Meskipun ARIA seringkali tidak terkait dengan gejala apa pun, gejala dapat terjadi dan meliputi sakit kepala, kebingungan, pusing, perubahan penglihatan, dan mual.

ARIA juga jarang muncul dengan edema otak yang serius dan mengancam jiwa yang dapat dikaitkan dengan kejang dan gejala neurologis berat lainnya. Perdarahan intraserebral dapat terjadi pada pasien yang diobati dengan kelas obat ini dan bisa berakibat fatal.

Mengenal Lecanemab

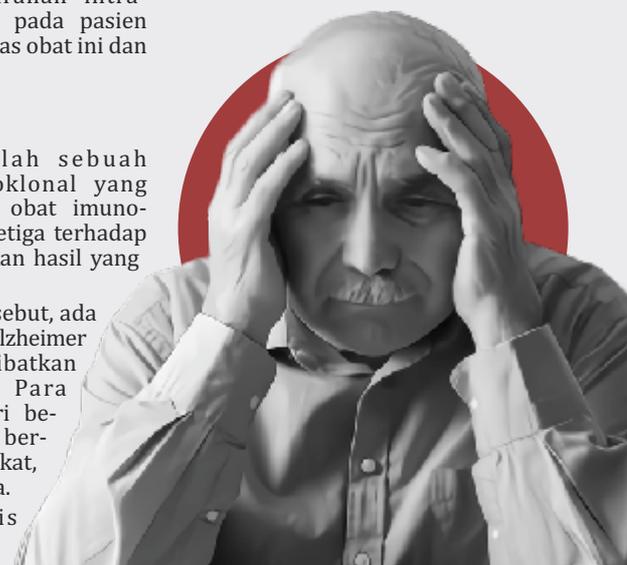
Lecanemab adalah sebuah terapiantibodi monoklonal yang dikategorikan sebagai obat imunoterapi. Uji klinis fase ketiga terhadap Lecanemab menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Dalam uji klinis tersebut, ada 1.795 pasien penyakit Alzheimer tahap awal yang dilibatkan sebagai partisipan. Para pasien ini berasal dari beberapa wilayah yang berbeda yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, dan Eropa.

Selama uji klinis

berlangsung, tim peneliti melakukan pengukuran terhadap beberapa domain kognitif pasien, se-perti daya ingat, orientasi, kemampuan membuat penilaian dan penyelesaian masalah, hingga kemampuan merawat diri sendiri. Dari pengujian ini, tim peneliti menemukan bahwa pemberian Lecanemab dapat menekan penurunan kognitif hingga 27 persen lebih baik dibandingkan plasebo setelah 18 bulan.

Temuan ini diungkapkan oleh pihak produsen, yaitu Eisai yang berbasis di Jepang dan Biogen yang berbasis di Amerika Serikat. Terlepas dari khasiatnya sebagai terapi pengobatan yang menjanjikan untuk penyakit Alzheimer, obat ini juga memiliki efek samping, salah satunya adalah pembengkakan otak (berbagai sumber)



MASTODON, MEDIA SOSIAL ALTERNATIF PESAIN TWITTER

TWITTER akan menerapkan batasan bagi penggunanya bisa membaca tweet harian. Bagi pengguna yang gak nyaman dengan aturan baru itu dan memutuskan untuk pindah ke aplikasi lain, Mastodon bisa menjadi alternatifnya.

Postingan netizen yang memilih pindah ke Mastodon sudah bermunculan sejak Minggu (2/7) lalu, ketika Elon Musk mengumumkan batasan baca kicauan harian di Twitter. Lalu, apa itu Mastodon?

Mengenal Mastodon

Mastodon merupakan aplikasi media sosial microblogging yang didirikan oleh Eugen Rochko, pengembang software asal Jerman.

Aplikasi meluncur pada Maret 2016 lalu dan sekarang dikelola oleh Mastodon GmbH, organisasi non-profit di Jerman.

Pengembangan proyek Mastodon menggunakan dana urunan alias crowdfunding. Oleh sebab itu, tidak ada iklan atau postingan berbayar yang akan pengguna temukan di Mastodon, sehingga lini masa hanya diisi postingan pengguna.

Mastodon secara tampilan desain mirip dengan Twitter. Bedanya, platform ini bersifat terbuka atau open-source dengan jaringan desentralisasi.

Media sosial ini memfasilitasi komunitas online atau instance (server). Setiap pengguna Mastodon merupakan anggota dari server tertentu, misalnya, @mastodon.social, @mastodon.world, @mstdn.id, dan lain sebagainya.

Jika bingung, pengguna bisa cek daftar server berdasarkan lokasi (Jakarta, Bandung, Indonesia, dan lain-lain) atau topik minat tertentu ketika membuat akun baru Mastodon.

Meski penggunanya memiliki instance yang berbeda-beda, mereka masih bisa saling berinteraksi satu

sama lain. Ini alasan mengapa Mastodon dikenal sebagai jaringan sosial 'federasi' alias 'Fediverse'.

Pengguna bisa daftar ke server mana pun di Mastodon, termasuk membuat server baru sendiri lewat donasi di Patreon. Setiap instance memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, misal, seberapa ketat moderasi percakapannya.

Tidak seperti Twitter, nama akun pengguna Mastodon lebih panjang menjadi @(nama akun)@(nama instance Mastodon yang pengguna daftar). Contohnya, @Fikrie@kumparan.social.

Postingan di Mastodon disebut dengan 'toot', bukan 'tweet'. Pengguna bisa posting konten atau toot hingga 500 karakter.

Pengguna dapat mengontrol siapa yang bisa lihat postingan, mulai dari publik (postingan bisa dilihat oleh pengguna beda server) hingga hanya pengguna yang di-mention. Ada juga fitur peringatan spoiler untuk teks dan gambar ketika sedang browsing postingan pengguna lain.

Hashtag atau tagar di Mastodon mirip dengan Twitter untuk topik yang sedang tren. Pengguna bisa membagikan postingan orang lain kepada follower pengguna yang fungsinya mirip retweet.

Batas baca tweet harian di Twitter

Elon Musk sendiri mengatakan Twitter sedang membatasi pengguna membaca tweet harian pada Minggu (2/7). Ini yang menjadi penyebab Twitter mendadak eror dengan banyak pengguna mengeluh gak bisa refresh lini masanya pada Sabtu (1/7) malam.

"Untuk mengatasi tingkat pengikisan data dan manipulasi sistem yang ekstrem, kami telah menerapkan pembatasan sementara," cuit Musk di akun Twitter miliknya.

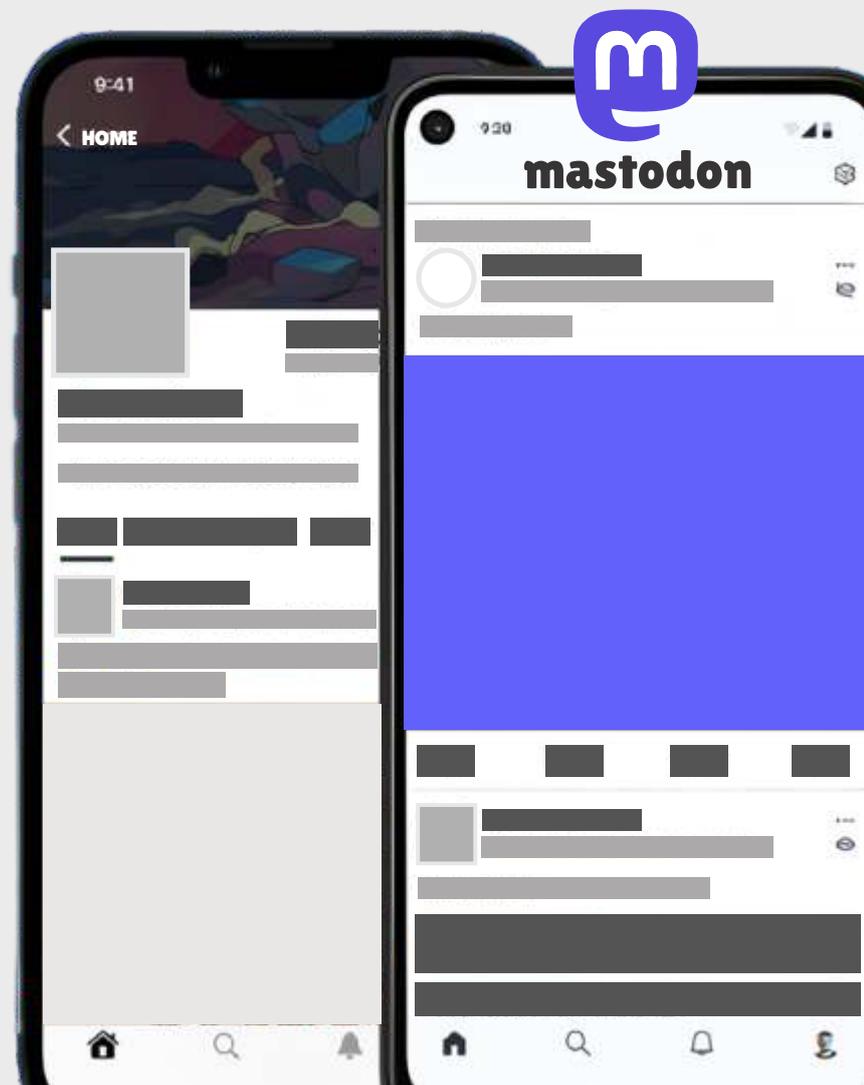
Orang terkaya di dunia itu tidak

menjelaskan lebih detail soal manipulasi sistem yang dimaksud.

Aturan baru ini berlaku untuk semua pengguna. Sekarang batas baca kicauan adalah 10.000 twit per hari untuk akun centang biru alias pelanggan Twitter Blue, 1.000 twit per hari untuk akun gratisan, dan 500.000 twit per hari untuk akun yang baru

dibikin.

Batasan akan semakin ketat ke depannya. Musk berencana membatasi pengguna Twitter membaca cuitan sebanyak 8.000 tweet per hari buat akun terverifikasi, 800 tweet per hari buat akun gratisan, dan 400 tweet per hari buat akun baru (kumparan)



MENGATASI DEPRESI MELANKOLIS

SUASANA hati yang sulit merasa gembira menandakan ciri gejala depresi melankolis.

Saat mendapat kabar gembira sikapnya pun tetap murung dan suasana hatinya tak menjadi senang.

Mengutip Healthline, depresi melankolis tergolong major depressive disorder.

Depresi mayor kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih dan putus asa terus-menerus.

Gangguan depresi mayor kondisi kesehatan mental yang ditandai perasaan sedih dan putus asa yang intens atau terus-menerus.

Kondisi ini mempengaruhi susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Suasana hati yang ekstrem merasa seperti hidup tidak layak dijalani.

Mengutip WebMD, orang dengan depresi melankolis memiliki kortisol tingkat tinggi. Kortisol termasuk hormon steroid yang dibuat oleh kelenjar adrenal saat stres. Itu mempengaruhi fungsi dalam tubuh, termasuk nafsu makan, metabolisme, dan ingatan.

Kehilangan minat terhadap aktivitas yang menyenangkan salah satu ciri umum kondisi depresi. Fisik terasa seperti kekurangan energi, mudah merasa cemas atau terasinggung. Sulit berkonsentrasi membuat keputusan dan mengingat sesuatu juga dipengaruhi kondisi depresi.

Merujuk Psych Central, depresi melankolis cenderung tampak gejala fisik, seperti memperlambat gerak dan ucapan atau murung.

Sering merasa sulit untuk mendapat tidur yang cukup sampai mempengaruhi penurunan berat badan

Depresi melankolis akan mengganggu aktivitas kehidupan. Berkonsultasi dengan ahli kesehatan mental langkah terbaik supaya gejala tak berlanjut ekstrem. Terapis kesehatan mental akan membimbing agar pikiran dan perilaku supaya bisa mengurangi gejala.

Sesi terapi psikologis penting untuk mencegah depresi tak makin parah. Saat sesi terapi, terapis secara bertahap akan membicarakan tentang gejala dan masalah lainnya yang ingin diceritakan.

Fokusnya akan beradaptasi dengan situasi yang memicu stres. Ini berguna untuk menghadapi tantangan dan mengatasi masalah.

Kepercayaan diri yang meningkat akan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Saat fase bertahap juga sambil memperbaiki kemampuan berkomunikasi. (Ist)



BEBERAPA GEJALA DEPRESI MELANKOLIS

- Menunjukkan ekspresi atau respons emosional yang sangat sedikit
- Mengalami penurunan berat badan akibat kehilangan nafsu makan
- Mengalami sulit tidur
- Merasa putus asa atau bersalah
- Mengalami kesulitan konsentrasi dan mengingat
- Memiliki pikiran untuk bunuh diri

Jika mengalami gejala depresi melankolis seperti yang telah disebutkan di atas, segera konsultasikan ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak membahayakan diri Anda.



Misteri Sosok (dari hal 1)

KAPUSPENKUM Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana memastikan pihaknya akan mengusut dan mendalami informasi sosok X,Y, dan Z, yang muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo. Pendalaman sudah dimulai dengan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi. "Ini kami lagi melakukan serangkaian pemanggilan. Semua akan kami dalam informasi yang beredar di luar," kata Ketut saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Soal sosok X,Y,Z ini muncul saat disinggung oleh seorang terdakwa kasus BTS Kominfo, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. Kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, membenarkan soal itu.

Sosok X,Y, dan Z ini diduga menerima aliran uang dari Irwan. Maqdir menyebut kliennya hanyalah kurir pengantar uang haram proyek BTS Kominfo. "Saya enggak tahu persisnya ya. Karena Irwan sendiri hanya menyebut uang itu ke X,Y,Z," kata Maqdir, Senin (10/7/2023).

Menurut informasi yang dihimpun, ketiga sosok itu disebut saat Irwan menerangkan soal aliran uang Rp 119 miliar yang ia terima terkait proyek BTS Kominfo. Diduga, uang itu salah satunya diperuntukkan sebagai upaya penyelesaian kasus proyek BTS Kominfo yang tengah diusut oleh penegak hukum agar tidak mencuat.

Terkait Z, belakangan dihubungkan dengan sosok Menpora Dito Ariotedjo. Dito pun sudah diperiksa Kejagung terkait tudingan uang tersebut. Ia diperiksa sehari sebelum dakwaan Irwan dibacakan. Dito membantah menerima uang Rp 27 miliar. Tak lama berselang, Maqdir mengaku mendapat Rp 27 miliar dari pihak swasta terkait BTS Kominfo. Uang itu akan diserahkan ke Kejagung. Dia hanya menyebut diterima dari pihak swasta, tanpa mengungkap identitasnya.

Uang dalam bentuk dolar itu rencananya bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/7/2023) mendatang. "Ada pihak swasta yang menyerahkan uangnya dan uangnya sekarang ada dari kantor kami," ungkap Maqdir. "Iya nanti akan diserahkan (ke Kejagung). Nanti kita ketemu di Kejaksaan Agung. Kita perhatikan itu uangnya benar apa enggak," sambungnya.

Kejagung sendiri menyebut pihaknya telah memeriksa lebih dari 500 saksi untuk mengusut perkara korupsi BTS Kominfo. Dugaan korupsi BTS 4G ini mencuat sejak pertengahan tahun 2022. Pada 25 Oktober 2022, Tim Jampidsus Kejagung melakukan gelar perkara/ekspose. "Kami terus secara intensif mengusut kasus BTS, Minggu depan kita lakukan pemanggilan untuk pendalaman," papar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana.

Sampai saat ini, penyidik Kejagung sudah memanggil lebih dari 500 orang saksi dalam perkara BTS. "Ini bukti sangking seriusnya kami mengusut kasus BTS," tegasnya. Baca juga : Usut Tuntas Deretan Nama Politisi yang Hilang Dalam Dakwaan Korupsi BTS

Terkini, penyidik Kejagung memeriksa empat saksi dalam perkara tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian umum (TPPU) dalam perkara BTS.

Ketut menuturkan saksi pertama yang diperiksa, yakni EHP selaku Tenaga Ahli Perencanaan Jaringan Transmisi PT Nusantara Global Telematika dan PT Menara Cahaya Telekomunikasi. Kemudian RDP selaku Tenaga Ahli Transmisi dan ES selaku Tenaga Ahli Finansial dan Bisnis. "Terakhir saksi inisial DMS selaku Sales Director PT Fiberhome Technologies Indonesia," tutur Ketut.

Adapun keempat saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan TPK tersangka Muhammad Yusrizki dan TPPU tersangka Windi Purnama. "Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkas dalam perkara dimaksud," ujar dia.

Windi Purnama adalah orang kepercayaan terdakwa Irwan Hermawan dan Yusrizki. Yusrizki merupakan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP). Dalam berita acara perkara (BAP), terdakwa Irwan Hermawan mengaku seluruh uang yang diterimanya tak ada yang digunakan sepeserpun. Uang tersebut disebarkan ke 11 pihak.

Hakim Diminta Tolak Eksepsi Plate

Di sisi lain, Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menkominfo Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Jaksa meminta sidang kasus korupsi proyek BTS 4G dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

"Dengan demikian, dalil keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan harus di kesampingkan atau tidak diterima," kata jaksa saat membaca tanggapan dalam sidang di PN Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

"Oleh karena itu, maka kami JPU memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan: menolak keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Johnny G Plate untuk seluruhnya," lanjutnya.

PROPORSI PENDAPAT RESPONDEN SOAL MUATAN ISU DALAM KASUS KORUPSI BTS YANG MELIBATKAN JOHNNY G PLATE (JUNI 2023)



Menurut jaksa, eksepsi Johnny G Plate telah masuk ke pokok perkara dan surat dakwaan Plate telah sesuai dengan aturan hukum. Jaksa meminta perkara Johnny G Plate dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. "Menetapkan pemeriksaan Terdakwa Johnny G Plate tetap dilanjutkan," ucapnya.

Jaksa juga meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan eks Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif. Menurut jaksa, surat dakwaan Anang sudah cermat dan memenuhi syarat formil.

Sebelumnya, Plate meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Plate meminta hakim membebaskannya dari tahanan. Hal itu disampaikan Plate dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Achmad Cholodin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7/2023). Achmad meminta hakim menerima seluruh keberatan Johnny G Plate terkait kasus ini.

"Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya," katanya.

"Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan," sambungnya. Achmad meminta hakim dalam putusan sela menyatakan tidak melanjutkan sidang kasus korupsi proyek BTS 4G ini ke tahap pemeriksaan. Achmad meminta hakim memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Plate ke semula.

Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan berkomentar terkait terseretnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dalam kasus BTS 4G. Kepala Negara beralasan, kasus tersebut menjadi ranah penegak hukum, sehingga sebaiknya ditanyakan langsung ke jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tanyakan ke aparat penegak hukum. Jangan ditanyakan kepada saya, wilayahnya ada di sana," kata Jokowi usai peresmian Tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut, Jokowi kembali menekankan agar semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Selalu saya sampaikan kepada semuanya (agar) menghormati, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada," ujar Jokowi menegaskan.

Sementara itu, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) masyarakat percaya mantan Menkominfo Johnny G. Plate terlibat korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

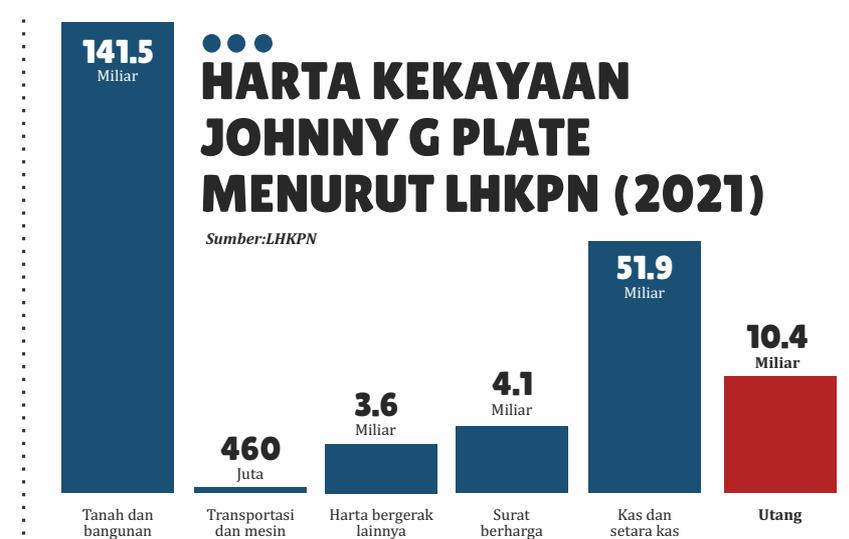
Survei dalam kasus tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, pertama dilakukan pada April 2023 dan survei kedua dilakukan pada Juli 2023. Dari total responden yang ditanya pada survei kedua mengenai kasus dugaan korupsi BTS dengan tersangka Johnny G. Plate, sebanyak 32,3 persen responden tahu meningkat dari survei yang pertama hanya 16,2 persen.

Kemudian dari total 32 persen orang yang mengetahuai jika mantan Menkominfo Johnny G Plate masuk dalam pusara kasus tersebut, sebanyak 29,9 persen percaya jika Johnny G Plate terlibat dalam kasus tersebut.

"Sekitar 32.3% tahu/pernah mendengar kasus dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo Johnny G. Plate, dari yang tahu mayoritas (59.9%) percaya bahwa Johnny G Plate melakukan korupsi," tulis dalam isi keterangan tertulis dikutip Selasa (11/7/2023).

Survei LSI kali ini dilakukan dengan menggunakan metode random digit dialing (RDD) yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dari populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1242 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening serta diwawancara secara langsung. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. (wid,rls,kum, ist/dya)



Kapal Berbendera Iran Ditangkap di Natuna Utara Bawa Minyak Senilai Rp 4,6 Triliun, Diduga Ilegal



Kapal patroli KN Pulau Marore-322 milik Bakamla menginspeksi kapal MT Arman 114 berbendera Iran, dan MT S Tinos berbendera Kamerun, saat terlihat melakukan pelayaran kapal- transfer minyak ke kapal tanpa izin, dekat Laut Natuna Utara, 7 Juli 2023 (Bakamla)

JAKARTA-Badan Keamanan Maritim Indonesia (Bakamla) mengumumkan pihaknya telah menyita kapal supertanker berbendera Iran. Kapal itu diduga terlibat dalam transshipment minyak mentah ilegal. Coast Guard Indonesia ini mengatakan Very Large Crude Carrier (VLCC), MT Arman 114, membawa 272.569 metrik ton minyak mentah ringan, senilai Rp4,6 triliun dan diduga mentransfer minyak ke kapal lain tanpa izin.

"Muatannya kapal ini super mirip-mirip seperti kapal induk lah panjangnya 330 m kapal itu normalnya cuma 80 m 100 m jadi 330 hampir sebesar lapangan bola. Muatannya ini ada 272.569 matriks ton atau 2,3 juta barel ini senilai Rp 4,6 triliun," ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, jika penjualan minyak itu dilakukan secara legal, Indonesia dapat memperoleh pemasukan dari penjualannya. Dia menyebutkan paling tidak Indonesia menerima pajak sekian persen dari total penjualan. "Luar biasa, harusnya masuk pajak negara berapa persen

lumayan," kata dia.

Dia mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami penangkapan kapal itu terkait aktivitas ilegalnya. Dia pun menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian.

Dari hasil penyelidikan sementara, menurut Aan, ada tiga perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan kapal itu. Di antaranya, melakukan transshipment, membuang limbah, serta mematikan automatic identification system (AIS).

"Yang jelas dugaan dari pendalaman sementara, jadi perusahaan memang memerintahkan kapal ini, 'Eh kamu jualan di titik ini karena ada pembeli di sini, makanya mereka melakukan transit di sini dan di wilayah Indonesia'," jelasnya.

"Jadi boleh dibilang kayak dilecehkan lah seolah-olah tidak ada aparatnya tidak ada yang menjaga. Jadi berbuat seenaknya. Nggak boleh dong. Akhirnya kita proses," sambungnya.

Aan pun lantas berharap kasus ini dibawa ke pengadilan. Hal itu, menurut dia, agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. "Harapan saya ini sampai ke pengadilan, apapun pengajuan hukumnya, paling tidak ada, ada efek jera, dia tidak ngulang lagi di perairan kita," tuturnya.

Sebelumnya, kapal patroli Bakamla RI, KN Pulau Marore 322, menangkap kapal super tanker MT Arman 114 berbendera Iran yang bermuatan minyak mentah atau light crude oil (LCO) sebanyak 272.569 metrik ton atau senilai Rp 4,6 triliun. Kapal tersebut kedatangan melakukan aktivitas

ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara.

Penangkapan terjadi pada Jumat (7/10/2023). Penangkapan bermula ketika kapal Bakamla mendeteksi ada sesuatu yang mencurigakan. "Jadi pagi hari kita melihat ada sesuatu yang mencurigakan, tidak seperti biasanya, dan itu terjadi di ZEE Indonesia. Kemudian, karena kontak ini mencurigakan, saya memerintahkan unsur patroli udara yang dimiliki oleh Bakamla untuk mendeteksi kontak tersebut," kata KLaksda TNI Aan Kurnia.

Aan menjelaskan, selain kapal berbendera Iran, terdapat juga kapal berbendera Kamerun. Dua kapal tersebut tertangkap saat melakukan transshipment minyak mentah. "Kedua kapal tersebut tidak merespon komunikasi dan berusaha menghindari proses pemeriksaan dengan melarikan diri dalam posisi selang masih menempel (proses transshipment tetap berlangsung) sehingga dilakukan pengejaran seketika hingga memasuki wilayah ZEE Malaysia," jelasnya.

Pembicaraan Natuna di AMM

ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-56 yang digelar di Jakarta pekan ini juga bakal membahas mengenai Laut Natuna. Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken juga bakal berpartisipasi. Bahkan, Blinken dijadwalkan akan menggelar jumpa pers di Jakarta pada Jumat (14/7/2023) malam.

Momen perhelatan AMM ke-56 ini bakal dimanfaatkan Blinken untuk mendorong negara anggota ASEAN mengambil tindakan lebih keras terhadap junta Myanmar dan menghadapi aksi agresif Cina di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan.

"Kami benar-benar mengharapkan teman dan mitra kami di ASEAN untuk terus menurunkan perwakilan

Myanmar di tingkat menteri ASEAN dan kami juga berharap dapat menemukan cara untuk meningkatkan tekanan pada rezim (junta Myanmar) untuk memaksa rezim tersebut mengakhiri kekerasannya dan kembali ke jalan demokrasi," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur Daniel Kritenbrink.

Kritenbrink mengungkapkan, selain isu Myanmar, saat hadir di AMM, Blinken akan turut mengangkat persoalan tindakan agresif dan tak bertanggung jawab Cina di Laut Cina Selatan. Menurut Kritenbrink, terdapat tren peningkatan atas aksi-aksi berbahaya Beijing di wilayah perairan yang dipersengketakan tersebut.

"Ini bukan masalah membuat negara-negara mengikuti pandangan AS, ini masalah bekerja dengan mitra kami untuk memajukan pandangan dan visi bersama kami untuk kawasan ini, dan untuk mendorong kembali perilaku yang bertentangan dengan visi itu," ucap Kritenbrink.

Cina diketahui mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya. Klaim itu ditentang sejumlah negara ASEAN yang wilayahnya turut mencakup perairan tersebut, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Wilayah Laut Natuna Utara Indonesia juga bersinggungan langsung dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan. (wid,rls, ant,kum/dya)

UPAYA BAKAMLA MENJAGA KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA



Melakukan patroli, di antaranya:

- Patroli bersama instansi lain secara terpadu dan terintegrasi.

- Patroli mandiri sesuai perundang-undangan.

- Patroli terkoordinasi dengan instansi penegak hukum negara lain.



Menyusun kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum.



Membantu dalam pencarian dan pertolongan, di bawah koordinasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dengan mengembangkan:

- Sarana dan prasarana pendukung
- Sistem Pendukung
- Kapasitas sumber daya manusia



Melakukan penegakan hukum, meliputi:

- Pengumpulan data dan informasi dugaan pelanggaran.

- Penindakan jika ditemukan cukup bukti atau tertangkap tangan.

- Penyerahan hasil penindakan kepada penegak hukum.



Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menunjukkan foto kapal super tanker berbendera Iran yang diduga melakukan tindakan ilegal di ZEEI di Laut Natuna Utara saat konferensi pers, Selasa (11/7/2023). (Bakamla)